

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan pada hakekatnya hanya merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah manusia yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. dalam panduan keluarga sejahtera (1996:10) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya

A. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Secara etimologis WJS Poerwadarminta, 2001 memberikan pengertian miskin dengan "tidak berharta benda atau serba kurang" The Concise Oxford Dictionary, 1995 memberikan pengertian miskin (poor) dengan "lacking

adequate money or means to live comfortably”. Sedangkan pengertian modifikatif terhadap kemiskinan (poverty) sendiri, menurut Bank Dunia yang telah dijadikan acuan internasional, yaitu “keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan 2 dollar AS per hari perkapita untuk perkotaan dan 1 dollar AS per hari untuk pedesaan”. Acuan ini telah mengandung indikator.

1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998 : 26).

Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (official figure) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Tatkala negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan pengecualian Amerika Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka

kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut.

Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US \$ 1 perkapita per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 perkapita per hari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan

yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu!) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya. Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995 : 59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat.

Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

B. Pendekatan Dalam Studi Kemiskinan

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam studi tentang kemiskinan, yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektif yaitu pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang telah ditentukan oleh pihak lain terutama para ahli yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial sesuai

dengan standar kehidupan, sedangkan pendekatan subyektif adalah pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang ditentukan oleh orang miskin itu sendiri yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial dari orang miskin dibandingkan dengan orang kaya yang ada dilingkungannya. Seperti diungkapkan oleh Joseph F. Stepanek, ed. (1985) bahwa pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan obyektif banyak ditemukan berbagai dimensi pendekatan yang digunakan oleh para ahli maupun lembaga.

Seperti BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat bahwa kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Sedangkan pendekatan pendapatan, melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan

seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Demikian pula pendekatan kemampuan dasar yang menilai bahwa kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan lainnya Pendekatan hak melihat bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. (Arief Noer Blog : Teori dan Pendekatan Masalah Kemiskinan)

C. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Dumairy(1996: 37-89) Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. dapat diringkaskan penambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah

sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170 ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang permenit. Banyaknya jumlah penduduk ini membawa Indonesia menjadi negara ke-4 terbanyak penduduknya setelah China, India dan Amerika.

Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam katergori bebabn ketergantungan.

Tenaga kerja (manpower) dipilih pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Seangkan yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja dalam

usia kerja yang tidak sedang bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, serta orang yang menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya.

Selanjutnya angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. Yang dimaksud dengan pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja maupun orang yang memiliki pekerjaan namun sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini oleh BPS dikategorikan sebagai pengangguran terbuka. (Dumairy, 1996)

3. Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan.

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional.

Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata. (Dumairy, 1996)

Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut juga sebagai ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Penyebabnya sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata-rata berapa pun, ketimpangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit. Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar, dan kemudian menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar. (Todaro, 2006)

Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional.

Ketimpangan sektoral dan regional dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek ± aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan.

Sepanjang era PJP I (lima pelita) yang lalu, sektor pertanian rata ± rata hanya tumbuh 3, 54 persen per tahun. Sedangkan sektor industri pengolahan tumbuh dengan rata-rata 12,22 persen per tahun. Di Repelita VI sektor pertanian saat itu ditargetkan tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata tahunan sektor industri pengolahan ditargetkan 9,4 persen per tahun. Tidak seperti masa era PJP I, dimana dalam pelita-pelita tertentu terdapat sektor lain yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan sektor industry pengolahan, selama Repelita VI tingkat pertumbuhan sektor ini dicanangkan yang tertinggi dibandingkan sektor±sektor lainnya. Sektor industry pengolahan diharapkan dapat menjadi pemimpin sepanjang sektor Repelita VI.

Ketimpangan pertumbuhan antarsektor, khususnya antara sektor pertanian dan sektor industry pengolahan harus disikapi secara arif. Ketimpangan pertumbuhan sektoral ini bukanlah µkecelakaan atau ekkses pembangunan. Ketimpangan ini lebih kepada suatu hal yang terencana dan memang disengaja terkait dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara industry. Akan tetapi sampai sejauh manakah ketimpangan ini apat ditolerir? Pemerintah perlu memikirkan kembali perihal ketepatan keputusan menggunakan industrialisasi sebagai jalur pembangunan karena akan sangat berdampak bagi pendapatan penduduk dan selanjutnya kemiskinan. (Dumairy, 1996)

4. Tingkat pendidikan yang rendah.

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Menurut Schumaker pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibandingkan faktor-faktor produksi lain. (Irawan, 1999)

5. Kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

D. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah semua pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah (Boediono, 1993:50). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Soetrisno (1984:312) mendefinisikan pengeluaran pemerintah sebagai penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah yang meliputi sumber

daya ekonomi termasuk penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, peralatan modal serta barang-barang dan jasa lainnya. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Durise, 2007:145). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah penggunaan uang untuk semua pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah dalam satu periode.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran pemerintah di Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Dumairy, 1996:164).

- a. Pengeluaran rutin
Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. (Undang-undang No.19 Tahun 2001).
- b. Pengeluaran pembangunan
Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat. (Undang-undang No.19 Tahun 2001). Namun pengelompokan di atas hanya berlaku hingga tahun 2001. Karena dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, terjadi perubahan dalam pengelompokan belanja daerah. Perubahan dalam belanja

daerah dikelompokkan menjadi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja transfer, dan belanja tidak tersangka.

1) Belanja aparatur daerah

Belanja aparatur daerah adalah belanja yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur daerah terdiri atas:

- a) Belanja administrasi umum
- b) Belanja operasi dan pemeliharaan
- c) Belanja modal.

2) Belanja pelayanan publik

Belanja pelayanan publik adalah belanja yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh aparatur, tetapi dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

Belanja pelayanan publik terdiri dari:

- a) Belanja administrasi umum
- b) Belanja operasi dan pelayanan umum
- c) Belanja modal

3) Belanja transfer

Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah, dengan kriteria:

- a) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan
- b) Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman

- c) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.
- 4) Belanja tidak tersangka

Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan:

- a) Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah
- b) Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan/atau tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan
- c) Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan/atau kelebihan penerimaan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Provinsi ataupun kabupaten/ kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 telah ditentukan bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Menurut Suparmoko (2000:22) pengeluaran pemerintah dapat bersifat “*exhaustive*” yaitu merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain. Di samping itu pengeluaran pemerintah juga dapat bersifat “*transfer*” saja yaitu

berupa pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (*grants*).

Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut (Suparmoko, 2000:44):

- Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat;
- Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
- Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas

Berdasarkan penilaian di atas Suparmoko (2000:45) membedakan bermacam-macam pengeluaran negara sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang "*self-liquidating*" sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang-barang ekonomi.
2. Proyek yang reproduktif, artinya pengeluaran mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat

- penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan meningkatkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan kesehatan masyarakat (*public health*) dan sebagainya.
3. Pengeluaran yang tidak “*self-liquidating*” maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-obyek tourisme dan sebagainya. Dalam hal ini dapat juga menyebabkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.
 4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
 5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

1. Teori Makro

Dalam teorinya, Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (Mangkoesoebroto 1997 : 169).

Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan dalam Mangkoesoebroto (1997 : 170), bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial, seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

2. Teori Mikro

Tujuan dari teori ekonomi mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang disediakan tersebut akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Anggaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah. Salah satu aktivitas pemerintah adalah pengeluaran pembangunan dalam berbagai sektor. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah direncanakan dalam perumusan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena anggaran tersebut merupakan variabel yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Alokasi dana pemerintah dalam anggaran (budget) yang bertindak sebagai alat pengatur prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu usaha

pembangunan harus selalu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Trilogi Pembangunan. (M. Suparmoko, 1999 : 49).

Melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, peranan pemerintah cenderung meningkat. Peningkatan kegiatan pemerintah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Adanya kenaikan tingkat penghasilan masyarakat, maka kebutuhan masyarakat juga meningkat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seperti kebutuhan akan prasarana transportasi, pendidikan, dan kesehatan umum.
2. Perkembangan penduduk, hal ini membutuhkan peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengimbangi perkembangan penduduk dalam memenuhi kebutuhan penduduk tersebut.
3. Perkembangan ekonomi, juga dibutuhkan peranan pemerintah yang besar guna mengisi kegiatan ekonomi.

**E. UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 dan UU No 36 tahun 2009 Pasal 171
Tentang Pengalokasian Dana Pendidikan dan Kesehatan**

- UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49
 - (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- UU No 36 tahun 2009 Pasal 171
 - (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
 - (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
 - (3) Besar anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

F. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Michael P Todaro

Faktor utama atau komponen pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat adalah :

- a. Akumulasi modal
- b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja
- c. Kemajuan teknologi

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Dalam hal ini akumulasi modal ini merupakan pendapatan pemerintah, apabila pendapatan pemerintah ini surplus, sehingga sebagian dari surplus itu ditabung dan kemudian diinvestasikan dalam bentuk pengeluaran pemerintah maka akan menghasilkan efek yang lebih besar lagi bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Untuk aspek pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui :

1. Peningkatan jumlah prosentase belanja pembangunan diharapkan setiap tahun meningkat serta signifikan dari total APBN.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
4. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
5. Pengurangan jumlah dan persentase penduduk miskin.
6. Pengurangan jumlah dan persentase pengangguran.
7. Memacu sektor industri dan sektor unggulan lainnya, terutama sektor pariwisata, perdagangan, pertambangan, jasa-jasa dan koperasi.
8. Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk dapat melayani kepentingan publik secara merata.

9. Peningkatan dan pengembangan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta.
10. Peningkatan kesempatan dan lapangan kerja.

Dalam mencapai pertumbuhan dan perbaikan yang ingin dicapai, beberapa kendala yang mungkin menjadi penghambat adalah :

1. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktifitas kerja serta tumbuhnya sikap yang apatis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang akan dicapai.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kendala pembangunan yang paling penting, sebagian besar penduduk dunia masuk kerja dengan pendidikan SD dan SLTP, serta sering tanpa disertai keterampilan khusus. Dari segi pendidikan sekolah, angka partisipasi murni (APM) untuk pendidikan dasar, dan menengah masih sangat rendah.

3. Lambatnya Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemulihan ekonomi daerah akibat krisis moneter dan ekonomi telah berakibat pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pertumbuhan yang negatif dan saat ini sudah mulai membaik. Belum pulihnya perekonomian disebabkan juga oleh belum banyaknya investasi yang masuk dari luar daerah.

4. Minimnya pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi proses pembiayaan pembangunan yang harus dikerjakan.

Apabila PAD meningkat maka persentase belanja pemerintah akan meningkat dan mempermudah proses pembangunan sehingga akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

G. Pembangunan Ekonomi: Tindakan-Tindakan Domestik

Ada beberapa tindakan-tindakan domestik yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, (M.L. Jhingan, 2004 : 337) antara lain :

1. Pembentukan modal dan pembangunan ekonomi
2. Pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan
3. Peranan pertanian didalam pembangunan ekonomi
4. Kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi
5. Kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi
6. Keuangan defisit sebagai piranti pembangunan ekonomi
7. Kebijakan harga dalam pembangunan ekonomi
8. Pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi
9. Pembentukan modal manusia
10. Kewiraswastaan dalam pembangunan ekonomi
11. Peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi

Fokus penelitian ini adalah mengenai pembentukan modal manusia. Gagasan investasi pada modal manusia adalah betul-betul baru. Dalam proses pertumbuhan ekonomi, lazimnya orang lebih menekankan arti penting akumulasi modal fisik. Sekarang semakin disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia, yaitu “ proses

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara”. Studi yang diadakan Schultz, Harbison, Denison, Kendrick, Moses Abramovits, Becker, Mary Bowman, Kuznets, dan sekelompok ahli ekonomi lainnya menyatakan bahwa salah satu dari beberapa faktor penting yang menyebabkan pertumbuhan cepat perekonomian Amerika adalah pembiayaan pendidikan yang secara relatif selalu meningkat. (M.L. Jhingan, 2004 : 415).

Menurut Schultz, ada lima cara pengembangan sumber daya manusia, antara lain :

1) Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga dan vitalitas rakyat; 2) latihan jabatan, termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan; 3) pendidikan yang diorganisasikan pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi; 4) program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstension khususnya pada pertanian; 5) Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. (M.L. Jhingan, 2004 : 414).

H. Model Human Capital dan Pertumbuhan

Model ini merupakan pengembangan dari model Solow, dimana fungsi produksi adalah (Romer, 1996) :

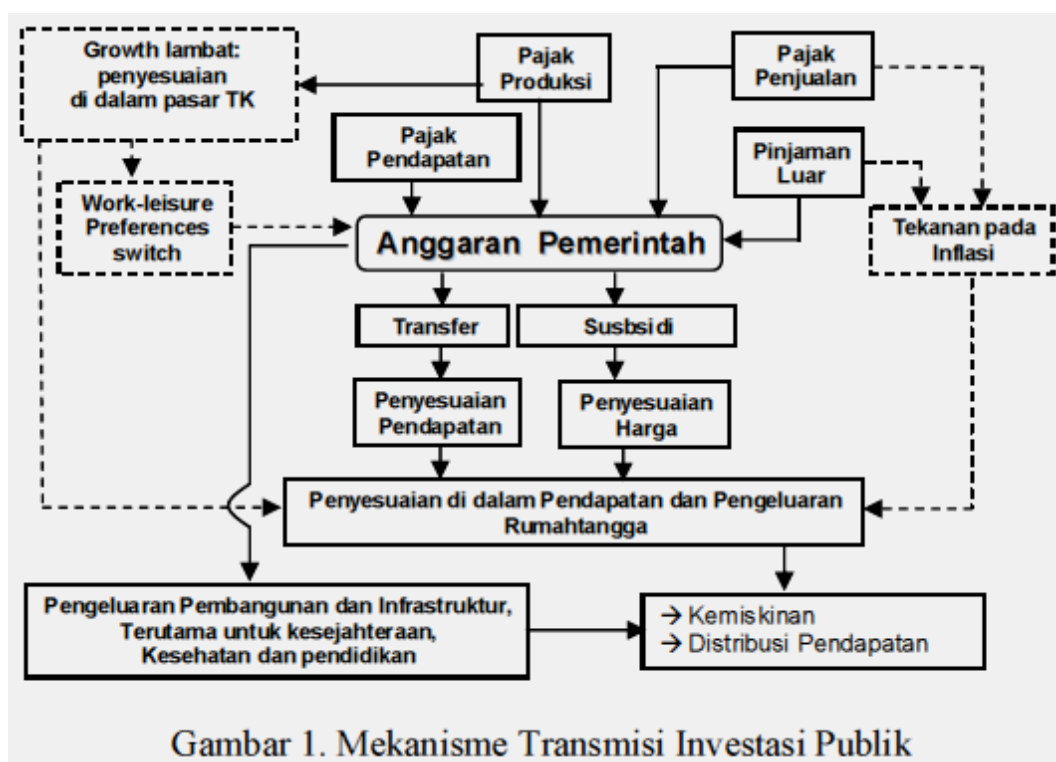
$$Y(t) = K(t)^\alpha H(t)^\beta [A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta}$$

Persamaan diatas menyatakan bahwa $Y(t)$ output suatu perekonomian merupakan fungsi dari $K(t)$ Kapital, $H(t)$ Modal Manusia, $A(t)$ Teknologi dan $L(t)$ Tenaga Kerja. Menurut Park (1995), modal manusia dapat diartikan sebagai spesialisasi

keahlian yang disediakan tenaga kerja dan dapat diperoleh dengan mengalokasikan pendapatan untuk pendidikan dan kesehatan.

I. Mekanisme Transmisi Investasi Publik

Mekanisme transmisi investasi publik untuk mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan di tampilan pada Gambar 1, dibawah ini :



Sumber: Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga dalam "Dampak Investasi

Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Iindonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium"
Jurnal Ekonomi.

Dari sisi pengeluaran, penurunan kemiskinan dan redistribusi pendapatan dapat dilakukan dengan tiga instrumen alokasi anggaran pemerintah, yaitu (1) subsidi langsung atau subsidi individu yang ditargetkan pada rumah tangga berpendapatan

rendah, (2) subsidi harga, subsidi komoditi yang digunakan oleh rumah tangga terutama untuk kebutuhan pokok, dan (3) pengeluaran langsung pemerintah terhadap pelayanan publik dan infrastruktur, terutama pada sektor kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan, yang diutamakan untuk rumahtangga berpendapatan rendah. Fokus studi ini pada instrumen fiskal pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan. Dari sisi penerimaan, pembiayaan dapat bersumber dari domestik berupa pajak atau pinjaman luar negeri.

J. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Pengeluaran Pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan komposisi yang diperlukan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran pada kedua sektor ini dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pengembangan Manusia (IPM). Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mendorong pembangunan ekonomi kearah yang lebih maju, sehingga pada akhirnya pembangunan ekonomi yang maju tersebut akan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan melepaskan masyarakat miskin dari jeratan kemiskinan.

K. Penelitian-Penelitian Terdahulu

1. Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan in Indonesia. Analisis

menggunakan kombinasi model Komputasi Keseimbangan umum dan metode Foster-Greer-Thorbecke. Investasi sumberdaya manusia diwakili oleh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa investasi sumberdaya manusia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumahtangga. Indeks rasio kemiskinan, indeks kesenjangan dan indeks intensitas kemiskinan juga menurun, kecuali untuk rumahtangga bukan angkatan kerja di kota. Investasi sumberdaya manusia untuk pendidikan memberi manfaat lebih besar bagi rumahtangga perdesaan dibandingkan dengan rumahtangga perkotaan, terutama untuk rumahtangga buruh pertanian dan pengusaha pertanian di perdesaan, sedangkan investasi kesehatan memberi manfaat lebih besar bagi rumahtangga bukan pertanian golongan atas di kota.

2. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan

Ada empat tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia. Pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Dimensi penting tersebut terangkum dalam indeks pembangunan manusia. Kedua, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan. Ketiga, melihat apakah ada pengaruh pembangunan

manusia terhadap kemiskinan. Empat, mengkaji nilai-nilai Islam dalam mengatasi permasalahan umat yang terkait dengan kemiskinan.

Data yang diteliti adalah data panel yang menggabungkan data cross section (data antar propinsi) dan data time series tiga tahunan (tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005). Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, serta data dari APBD masing-masing propinsi. Penelitian ini menggunakan beberapa metode data panel (Pooled Least Square/PLS, metode efek tetap/MET dan metode efek random/MER). Selanjutnya akan dipilih metode yang paling tepat dari ketiganya dengan menggunakan uji Chow, Hausman dan uji LM. Dari ketiga metode yang digunakan tersebut terpilih masing-masing metode untuk menjawab tiga penelitian, yaitu: Pertama, metode PLS merupakan metode terbaik yang digunakan untuk tujuan pertama.

Hasil metode PLS menunjukkan bahwa arah koefisien negatif yang tidak sesuai dengan hipotesis. Artinya, pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Kedua, random efek merupakan metode terbaik untuk tujuan kedua. Penggunaan metode tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Gambaran ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) masih rendah sehingga sangat sulit untuk bisa meningkatkan pembangunan manusia maupun untuk pengurangan kemiskinan. Terakhir, random efek terpilih menjadi metode terbaik untuk tujuan ketiga. Berdasarkan metode tersebut diketahui bahwa pembangunan manusia mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, konsep pembangunan manusia setidaknya sudah mendekati nilai-nilai Islam dalam mengatasi kemiskinan.

3. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk Investasi Sumber Daya Manusia (Investasi Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung).

Ada dua Tujuan yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Lampung sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Lampung sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin per-provinsi di pulau Sumatera, Provinsi Lampung merupakan provinsi terbanyak kedua setelah Sumatera Utara dalam jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hal tersebut tentunya masalah kemiskinan harus ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dibiayai oleh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Lampung sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Lampung sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Lampung sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Lampung sektor kesehatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung, tetapi pengaruh tersebut masih kecil. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan rumit, tidak hanya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan saja yang mempengaruhi kemiskinan. Masih banyak sekali faktor diluar model yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung, antara lain faktor diluar model tersebut dapat berupa tingkat inflasi, pengangguran, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain.